

**PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DI BADAN PERENCANAAN DAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO PROVINSI GORONTALO**

Reihan Fatwa Resky Ishak

NPP. 30.1323

*Asdaf Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo*

*Program Studi Keuangan Publik*

Email: reihanishak46@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Riswati, S.Pd, M.Si

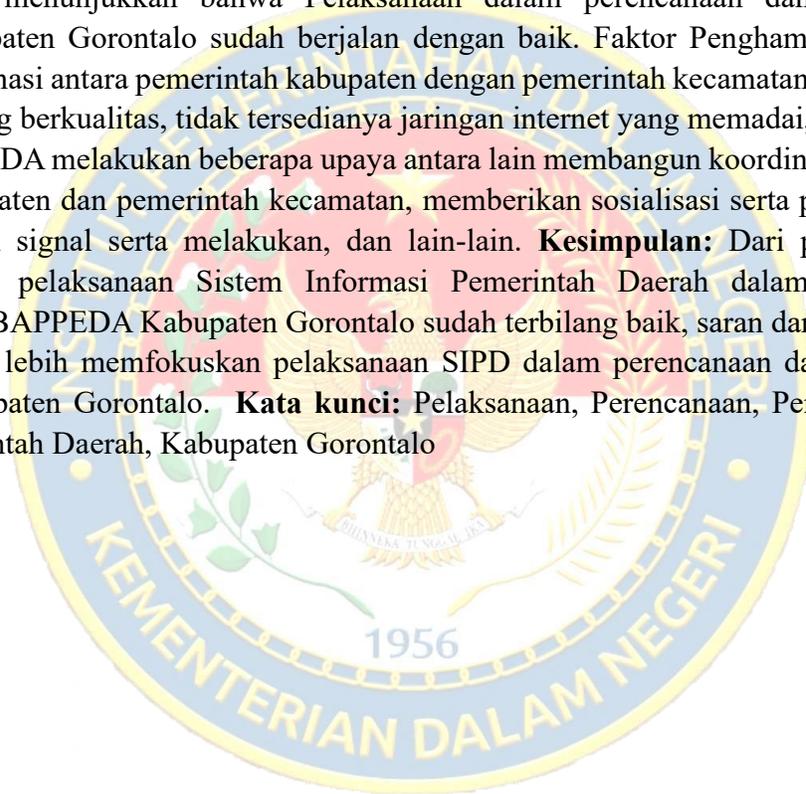
**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):**Implementation of planning and budgeting using the Regional Government Information System (SIPD) application at the Regional Planning and Development Agency (BAPPEDA) Gorontalo Regency, where prior to the application of SIPD the planning and budgeting processes were not supported by data and information that truly described conditions, potential, and real problems.**Objective:**This study aims to find out how SIPD is implemented in planning and budgeting, obstacles and efforts to overcome these obstacles in BAPPEDA Gorontalo District.**Method:** Assessment method in this study the researcher used a qualitative approach and for this type of research a qualitative descriptive type, with observational data collection techniques and interviews with informants who work at BAPPEDA Gorontalo Regency.**Findings:**The results of the research show that the implementation of planning and budgeting at BAPPEDA Gorontalo district has been going well. The inhibiting factor is that there is still a lack of coordination between the district government and the sub-district government, lack of quality human resources, unavailability of adequate internet networks, and others. districts, providing outreach and training, repairing and maintaining signals and conducting, and others.**Conclusion:**From this study it can be said that the implementation of the Regional Government Information System in Planning and Budgeting at BAPPEDA Gorontalo Regency is fairly good, suggestions from researchers should be that the government should focus more on the implementation of SIPD in planning and budgeting at BAPPEDA Gorontalo Regency.

**Keywords:** Implementation, Planning, Budgeting, Local Government Information System, Gorontalo District

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gorontalo, dimana sebelum penerapan SIPD pengambilan proses perencanaan dan penganggaran belum didukung oleh data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang nyata. **Tujuan:** Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran, hambatan serta upaya dalam mengatasi hambatan tersebut di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo. **Metode:** Metode pengkajian dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan untuk tipe penelitian tipe deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi dan wawancara pada informan yang bekerja di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan dalam perencanaan dan penganggaran di BAPPEDA kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik. Faktor Penghambatnya yaitu masih kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, tidak tersedianya jaringan internet yang memadai, dan lain-lain, oleh karena itu BAPPEDA melakukan beberapa upaya antara lain membangun koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan, memberikan sosialisasi serta pelatihan, perbaikan dan pemeliharaan signal serta melakukan, dan lain-lain. **Kesimpulan:** Dari penelitian ini dapat dikatakan bahwa pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo sudah terbilang baik, saran dari peneliti sebaiknya pemerintah harus lebih memfokuskan pelaksanaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo. **Kata kunci:** Pelaksanaan, Perencanaan, Penganggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, Kabupaten Gorontalo



## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai berikut “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Pengelolaan keuangan daerah adalah salah satu bagian yang selalu mengalami perubahan secara dasar dengan diterapkannya beberapa peraturan berupa Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perkembangan teknologi saat ini memang tidak bisa dihindari. Hampir seluruh aspek kehidupan dipengaruhi oleh teknologi. Mulai dari hal yang sederhana hingga hal yang paling rumit sekalipun. Perkembangan yang paling menonjol dirasakan pada ranah teknologi informasi. Sebagian besar informasi saat ini bisa diakses dengan mudah seiring dengan teknologi yang semakin canggih. Untuk mewujudkan data informasi yang akurat serta terciptanya pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan penganggaran, penggunaan teknologi menjadi kewajiban yang harus juga diterapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah atau disingkat menjadi SIPD, merupakan aplikasi pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang disingkat menjadi SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Agar terselenggaranya proses perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi supaya dapat melaksanakan serta menyalurkan data perencanaan maupun penganggaran secara transparansi terhadap masyarakat, sehingga proses tersebut dapat menjadi seiringan dengan prinsip good government.

Kabupaten Gorontalo khususnya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, SIPD sudah mulai dioperasikan sejak tahun 2021 untuk proses perencanaan dan penganggaran. Sebelum penggunaan SIPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala serius, pengumpulan data dari OPD karena lemahnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, dan Sumberdaya manusia. Kemudian pada kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yaitu proses pengambilan keputusan strategi perencanaan maupun penganggaran, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat yang memadai. Bahkan sebelum penerapan SIPD, dalam pengambilan proses perencanaan dan penganggaran belum didukung oleh data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang nyata di tingkat desa maupun kecamatan.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Untuk mewujudkan data informasi yang akurat serta terciptanya pemerintahan yang baik dalam perencanaan dan penganggaran, penggunaan teknologi menjadi kewajiban yang harus juga di terapkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah atau disingkat menjadi SIPD, merupakan aplikasi pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang odisingkat menjadi SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Agar terselenggaranya proses perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan serta menggunakan perkembangan teknologi supaya dapat melaksanakan serta menyalurkan data perencanaan maupun penganggaran secara transparansi terhadap masyarakat, sehingga proses tersebut dapat menjadi se iringan dengan prinsip good government.

Kabupaten Gorontalo khususnya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, SIPD sudah mulai di operasikan sejak tahun 2021 untuk proses perencanaan dan penganggaran. Sebelum penggunaan SIPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Dalam Pelaksanaannya sering mengalami kendala serius, pengumpulan data dari OPD karena lemahnya koordinasi antara BAPPEDA dan OPD, dan Sumberdaya manusia. Kemudian pada kondisi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian yaitu proses pengambilan keputusan strategi perencanaan maupun penganggaran, dan program pembangunan yang terdahulu belum sepenuhnya didukung oleh ketersediaan data dan informasi akurat yang memadai. Bahkan sebelum penerapan SIPD, dalam pengambilan proses perencanaan dan penganggaran belum didukung oleh data dan informasi yang benar-benar menggambarkan kondisi, potensi, dan permasalahan yang nyata di tingkat desa maupun kecamatan.,

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, tema dasarnya yakni tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Pada penelitian milik Muhammad Rizal Irwan pada tahun 2021 dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah di BEPPELITBANG Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan variable penerapan SIPD dalam perencanaan dan pembangunan di BAPPELITBANG dan faktor penghambat dalam penerapan Aplikasi SIPD, menunjukkan bahwa Kota tidore telah sukses menerapkan walau dengan berbagai hambatan yang dihadapi. (Muhammad Rizal Irwan 2021).

Penelitian kedua oleh Nanda Dias Eka Putra menggunakan metode penelitian Kualitatif fan variable efektifitas penerapan aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD dan hambatan dalam penerapan Aplikasi SIPD dalam penyusunan dokumen RKPD, memiliki temuan bahwa di Kabupaten Nganjuk penggunaan aplikasi SIPD masih kurang efektif di tahun awal penerapan, pegawai sangat terbantu dan mempermudah pekerjaan dalam menggunakan sistem ini. Hanya saja, di instansi tersebut dalam prosesnya masih tidak memahami penggunaannya secara menyeluruh. Hal in diakibatkan pemerintah hanya sekedar melakukan sosialisasi tapi tidak dengan melakukan pelatihan khusus kepada setiap instansi. Sehingga saat penginputan dilakukan, pegawai yang terkait dalam proses SIPD ini masih butuh bantuan pihak lain. (Nanda Dias Eka Putra 2021).

Penelitian milik Irvan Nasution dan Nurwani dengan menggunakan metode penelitian Kualitatif memiliki variable meningkatkan program pembangunan di segala bidang sebagai sarana menyampaikan informasi secara sempurna dan melibatkan semua orang secara meluas dengan memanfaatkan teknologi digital dan penerapan aplikasi SIPD pada BPKAD Kota Medan, dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi SIPD dalam menyusun kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk menjalankan program Pemerintah Kota Medan dan SIPD juga berfungsi untuk perencanaan pembangunan daerah, keuangan, serta sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. (Irfan Nasution dan Nurwani 2021)

persamaan dari penelitian sebelumnya terletak pada tema yang menjadi dasar dalam penyusunan penelitian yakni Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sedangkan perbedaan iniodengan penelitian sebelumnya yaitu padat bjek penelitian yang ada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis dan melihat pelaksanaan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam perencanaan dan penganggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gorontalo apakah sudah baik, agar hasilnya dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo kedepannya. Peneliti menganalisis dengan menggunakan 4 (empat) dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sesuai dengan teori Edward III (Abdullah : 2014). Tema dasar yang diambil pada penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian yang ada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis pelaksanaan perencanaan dan penganggaran melalui SIPD di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo apakah sudah baik atau belum.

## **II. METODE**

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan untuk tipe penelitian tipe deskriptif kualitatif, yang dimana peneliti akan mendeskripsikan ataupun menkonstruksikan hasil dari penelitian yang telah peneliti jalankan dalam hal ini berupa, observasi, wawancara ataupun dokumentasi yang nantinya akan peneliti temukan ketika turun lapangan nanti di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah di kabupaten Gorontalo. Disini peneliti akan bertindak sebagai fasilitator dan meralitaskan konstruksi oleh Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Selanjutnya peneliti akan bertindak sebagai aktivis yang akan ikut memberikan makna secara kritis dan realita yang peneliti temukan dilapangan.

Adapun riset kualitatif yang peneliti ambil dikarenakan akan sejalan dalam menguraikan ataupun mendeskripsikan fenomena yang terjadi dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah sedalam-dalamnya dengan pengumpulan data.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini penulis menganalisis focus penelitian yang telah dicantumkan dalam bab sebelumnya dan kemudian telah disesuaikan dengan data yang diperoleh melalui penelitian baik berupa data sekunder maupun hasil wawancara.

#### **3.1. Dimensi Operasional Konsep**

Dalam operasional konsep penulis menggunakan teori Edward III, teori tersebut terdiri dari 4 dimensi : komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

##### **3.1.1. Komunikasi**

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang terjadi pemikiran dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain. Faktor komunikasi dianggap sebagai faktor yang amat penting. Komunikasi membentuk kualitas partisipatif masyarakat. Dalam hal ini, komunikasi yang baik dan terarah perlu dilakukan oleh pihak pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten kemudian ke pemerintah kecamatan dan akhirnya berakhir kepada masyarakat terkhususnya pada saat proses perencanaan dan penganggaran.

##### **a. Transmisi**

Transmisi merupakan proses penyaluran komunikasi. Proses transmisi berjalan dengan baik akan dapat menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik pula dalam Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Proses transisi yang baik perlu dilakukan agar tidak ada miskomunikasi yang dapat menyebabkan permasalahan dalam pelaksanaan SIPD. Salah satu masalah yang peneliti temukan pada indikator ini yaitu kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat pada saat proses perencanaan, pemerintah kecamatan kurang memahami tujuan dari pemerintah kabupaten pada saat melakukan proses perencanaan maupun penganggaran.

Permasalahan lain juga terjadi Ketika kurangnya dalam pengadaan alat yang diterima kecamatan. Pemerintah kecamatan menganggap pemerintah kabupaten Gorontalo tidak memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh kecamatan untuk mengoperasikan SIPD. Padahal pemerintah kabupaten Gorontalo memang membatasi pengadaan alat dikarenakan alat yang dikirim dari pemerintah pusat sangat terbatas. Kurangnya komunikasi tersebut dapat mengakibatkan kesalah pahaman antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah kecamatan.

Komunikasi yang baik sangat perlu dilakukan agar tidak terjadi kesalah pahaman antara pemerintah pusat dan kabupaten. Selain komunikasi yang perlu dilakukan oleh aparat-aparat pemerintah, komunikasi yang baik juga perlu dilakukan dari pemerintah kepada masyarakat, agar masyarakat mengerti dan memahami tujuan dibuatnya Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

##### **b. Kejelasan**

Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana SIPD haruslah jelas, akurat, dan tidak bersifat ambigu. Kejelasan tersebut ditunjukkan untuk menghindari terjadinya perbedaan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan seperti yang telah ditetapkan (tidak tepat sasaran). Agar komunikasi menjadi jelas,

masing-masing pihak yang terkait sebagai pelaksana kebijakan tentunya harus memiliki kejelasan tugas dan kewajiban masing-masing.

### **c. Konsistensi**

Perintah yang diberikan kepada pelaksana sudah konsisten dan jelas. Apabila perintah sering berubah-ubah akan membingungkan pelaksana kebijakan. Sehingga tujuan dari kebijakan tidak akan dapat tercapai. Konsistensi dalam pelaksanaan Sistem Informasi pemerintahan Daerah dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran sudah terlaksana dengan baik karena perintah dalam mencapai tujuan kebijakan tidak berubah-ubah.

### **3.1.2. Sumber Daya**

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan, jika para personal yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif.

#### **a. Staf**

Dalam penerapan sistem informasi pemerintahan daerah sangat di butuhkan sumber daya manusia yang handal dalam hal ini memiliki keahlian dalam menggunakan teknologi informasi maupun non teknologi. Penguasaan teknologi atau orang yang memiliki keahlian dalam teknologi informasi menjadi penentu dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh, hal ini berkaitan erat dengan IT yang tidak semua orang dapat menguasainya. Begitu pentingnya keahlian dalam pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini, maka infrastruktur jaringan berperan penting dalam hal dasar untuk membentuk sumber daya manusia yang handal ataupun ahli dalam menggunakan teknologi informasi dalam hal ini adalah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.

#### **b. Wewenang**

Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. munculnya peraturan baru dan perubahan sosial politik menjadi salah satu penghambat khususnya pada saat proses penganggaran. Dengan adanya regulasi baru dari pemerintah, membuat para officials sering mengalami kendala pada saat proses penganggaran, karena harus melakukan penyesuaian baru lagi.

Peraturan Baru serta perubahan sosial politik dapat menghambat Pelaksanaan SIPD dalam proses Perencanaan dan Penganggaran. Sosial dan Politik ini sangat berperan penting dalam pembangunan Daerah, kondisi ini sering terjadi hingga saat ini, banyaknya kontradiksi yang terjadi di lingkungan Politik membawa dampak buruk terhadap pemerintah Kabupaten Gorontalo.

#### **c. Fasilitas**

Fasilitas fisik juga merupakan aktor penting dalam pelaksanaan. Pelaksana mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, maka pelaksanaan tidak akan berhasil. Seperti

pengadaan alat, yaitu jaringan internet, dan komputer. Apabila alat tersebut tidak memenuhi atau mengalami kendala seperti kerusakan maka secara langsung akan menghambat proses perencanaan dan penganggaran.

Permasalahan dalam pengadaan alat memang merupakan hal yang banyak terjadi di setiap OPD. Karena dari pihak pemerintah kabupaten Gorontalo belum melakukan pengadaan komputer dan perbaikan jaringan belum dilakukan. Hal ini disebabkan karena pemerintah pusat memberikan alat kepada pemerintah kabupaten sangatlah terbatas.

### **3.1.3. Disposisi**

#### **a. Birokrasi**

Disposisi atau sikap para pelaksana yang tidak mau melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan akan menimbulkan hambatan-hambatan bagi tercapainya tujuan dari pelaksanaan. Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan yang baik. Seperti admin yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari wilayah kabupaten Gorontalo agar tidak datang terlambat, karena keterlambatan merupakan ketidakdisiplinan yang akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan.

Kondisi tersebut akan menjadi penghambat jika mereka tidak memiliki komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap kebijakan yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi penting dalam sebuah instansi pemerintah apalagi yang berhubungan langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran.

#### **b. Insentif**

Salah satu Teknik untuk mengatasi kecenderungan sikap para pelaksana adalah dengan memanipulatif insentif. Pelaksanaan SIPD ini merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan, banyak hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan SIPD di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah kabupaten Gorontalo, Maka Kepala Bappeda berinisiatif untuk memberikan uang lembur guna untuk menambah semangat para admin dalam mengoperasikan SIPD tersebut.

### **3.1.4. Struktur Birokrasi**

#### **a. Standar Operational Procedure (SOP)**

SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai atau pelaksana SIPD untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya setiap hari sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pekerjaan yang baik haruslah mempunyai prosedur yang jelas dalam suatu kegiatannya. Begitu pun dalam pelaksanaan SIPD yang sangat memerlukan adanya kegiatan yang jelas dan perencanaan yang tersusun sesuai dengan pedoman RPJMD. dalam pelaksanaan SIPD di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo berlandaskan sesuai dengan Permendagri No. 90 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

#### **b. Fragmentasi**

Fragmentasi dilakukan untuk mempermudah suatu kebijakan dilaksanakan, karena kebijakan tidak dapat dimobilisasi oleh satu individu saja, maka dari itu dilakukan fragmentasi atau pembagian

kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja, dan ini akan sangat berkaitan dengan indikator SOP dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan stakeholder akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur.

### **3.2. Faktor Penghambat**

Masih ada hambatan atau kendala yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam hal ini Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

#### **3.2.1. Komunikasi**

##### **a. Transmisi**

Penyaluran komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gorontalo masih kurang baik, karena banyaknya tingkatan birokrasi sehingga sering terjadi miskomunikasi antara pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

**b. Kejelasan** penting tersedianya informasi yang akurat agar tidak terhambatnya pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah. data yang mencukupi juga sangat penting dalam perencanaan maupun penganggaran.

#### **3.2.2. Sumber Daya**

##### **a. Staf**

Sumberdaya yang tidak memadai menjadi penghambat dalam pelaksanaan sipd, karena hal tersebut berkaitan erat dengan IT yang tidak semua orang dapat menguasainya. Pemerintah maupun bappeda kabupaten Gorontalo harus bertanggung jawab dengan peningkatan kualitas sumberdayanya, dengan demikian Bappeda harus memberikan pelatihan dan sosialisasi agar hambatan tersebut dapat diatasi.

##### **b. Wewenang**

Regulasi yang terbit secara tiba-tiba akan menghambat pelaksanaan SIPD, Bappeda harus melakukan penyesuaian secara secepat dengan regulasi tersebut agar pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran tidak terhambat lagi.

##### **c. Informasi**

Di kabupaten Gorontalo khususnya di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, sosialisasi maupun praktek tentang SIPD ini masih sangat jarang diberikan oleh pemerintah. Pemerintah kabupaten Gorontalo harusnya bertanggung jawab dalam hal mengembangkan pengetahuan serta edukasi para pelaksana. Dengan pengetahuan yang cukup., tentu saja para pelaksana tidak akan terhambat dalam mengoperasikan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran.

#### **d. Fasilitas**

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sejauh ini telah berupaya untuk memenuhi dalam pengadaan alat, tetapi kendala yang dihadapi yaitu pemerintah pusat memang membatasi jumlah alat yang disediakan guna menunjang pelaksanaan SIPD khususnya pada proses perencanaan dan penganggaran tersebut.

### **3.2.3. Disposisi**

#### **a. Birokrasi**

Pemilihan dan pengangkatan personal pelaksana haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, Dedikasi yang tinggi juga sangat diperlukan agar terlaksananya pelaksanaan yang baik. Seperti admin yang tinggal di daerah yang cukup jauh dari wilayah kabupaten Gorontalo agar tidak datang terlambat, karena keterlambatan merupakan ketidakdisiplinan yang akan menjadi penghambat dalam melakukan suatu pelayanan.

#### **b. Insentif**

Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik.. tetapi pemberian uang lembur di bappeda masih saja terlambat karena faktor anggaran yang terbatas

### **3.2.4. Struktur Birokrasi**

**a. Standar Operational Procedure (SOP)** pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran di Bappeda Kabupaten Gorontalo sudah terlaksana dengan baik karena mempedomani Permendagri No 90 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, tetapi karena masih adanya oknum yang mengoperasikan aplikasi SIPD tidak sesuai dengan SOP, menjadi kendala pelaksanaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran.

#### **b. Fragmentasi**

Dilakukan fragmentasi atau pembagian kewenangan agar tugas-tugas yang harus dilakukan tidak menumpuk pada satu orang saja, dan ini akan sangat berkaitan dengan indikator SOP dimana nantinya seluruh kinerja yang telah dilakukan stakeholder akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur. Tetapi yang menjadi kendala dalam indikator ini yaitu adanya stakeholder yang melepas tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan.

### **3.3. Upaya yang Dilakukan BAPPEDA Kabupaten Gorontalo dalam Pelaksanaan SIPD pada**

#### **Perencanaan dan Penganggaran 3.3.1. Komunikasi a. Transmisi**

Bappeda sedang melakukan upaya dengan membangun koordinasi antar pemerintah di kabupaten Gorontalo agar tidak terjadi lagi miskomunikasi yang menyebabkan terhambatnya transisi di wilayah tersebut.

## **b. Kejelasan**

Dalam proses pemutakhiran data menyangkut perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta memuat data yang akurat agar tidak terhambatnya Pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan Penganggaran, Bappeda berupaya memberikan waktu percepatan dalam mengatasi hal tersebut serta mengecek Kembali data-data yang diberikan apakah sudah akurat atau belum.

### **3.3.2. Sumber Daya**

#### **a. Staf**

Sumberdaya yang tidak memadai menjadi penghambat dalam pelaksanaan sipd, maka dari itu pihak pemerintah dan bappeda memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk menambah wawasan serta pengetahuan para staf untuk menunjang pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggarrann.

#### **b. Wewenang**

Bappeda berupaya akan melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi yang baru diterbitkan oleh pemerintah kabupaten Gorontalo sehingga tidak akan lagi terhambatnya pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

#### **c. Informasi**

Ketika diberlakukannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah ini maka harus ada sosialisasi dari pemerintah. Bentuk dari sosialisasi ini berupa informasi atau pemberitahuan yang diberikan dari pemerintah pusat ke daerah untuk menjelaskan tentang bagaimana pengoperasian SIPD tersebut dan bagaimana prosedur tata cara pelaksanaannya. Dalam hal ini Bappeda berupaya memberikan pengumuman bahwa pentingnya penggunaan aplikasi tersebut. Karena mempermudah pekerjaan khususnya dalam proses perencanaan dan penganggaran.

#### **d. Fasilitas**

Di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah fasilitas menjadi salah satu penghambat Pelaksanaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran. Maka dari itu Bappeda melakukan upaya pemeliharaan jaringan yang dilakukan setiap minggu agar tetap terjaga jaringan yang baik guna menunjang pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran.

### **3.3.3. Disposisi**

#### **a. Birokrasi**

Karena admin SIPD seringkali terlambat datang ke kantor maka dari itu Bappeda melakukan upaya pemberian sanksi serta pemberian kendaraan dinas berupa motor agar admin SIPD bisa datang ke kantor tepat waktu dan melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

## **b. Insentif**

Dengan menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin dapat memotivasi para pelaksana kebijakan untuk dapat melaksanakan perintah dengan baik..bappeda berupaya membayarkan uang lembur secara tepat waktu agar pegawai menjadi semangat dalam mengerjakan tanggung jawabnya.

### **3.3.4. Struktur Birokrasi**

#### **a. Standar Operational Procedur (SOP)**

Dengan adanya Oknum yang mengoperasikan aplikasi SIPD ini tanpa prosedur yang telah ditentukan, maka dari itu Bappeda berupaya melakukan evaluasi tentang hasil kerja tiap akhir bulan.

#### **b. Fragmentasi**

Seluruh kinerja telah dilakukan stakeholder akan dinilai tingkat keefektifannya dan apakah sesuai dengan prosedur. Tetapi yang menjadi kendala dalam indikator ini yaitu adanya stakeholder yang melepas tanggung jawab yang telah diberikan oleh atasan. Maka dari itu Bappeda melakukan upaya penilaian keefektifan terhadap kinerja semua pegawai.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo maka kesimpulannya sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah dalam Perencanaan dan Penganggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo sudah terbilang baik, karena pelaksanaan yang dilakukan sudah sesuai dengan 4 (empat) dimensi yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.
2. Faktor penghambat yang harus dihadapi oleh Bappeda Kabupaten Gorontalo pada pelaksanaan sistem informasi pemerintah daerah dalam proses perencanaan dan penganggaran.

Hambatanhambatan tersebut antara lain yaitu :

- a. Kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan
- b. Terjadinya keterlambatan informasi serta data yang diperlukan oleh bappeda untuk pelaksanaan SIPD pada proses perencanaan dan penganggaran
- c. Belum tersedianya Sumberdaya manusia yang berkualitas dan Sarana-prasana yang memadai pula.
- d. Regulasi yang sering berubah-ubah
- e. Kurangnya fasilitas yang ada di bappeda
- f. Admin SIPD sering datang terlambat karena jarak tempat tinggal yang jauh
- g. Adanya oknum yang mengoperasikan SIPD tidak sesuai dengan SOP
- h. Adanya *stakeholder* yang melepas tanggung jawabnya

3. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada upaya yang dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo sebagai berikut :
  - a. Membangun koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan
  - b. Memberikan waktu percepatan pemutakhiran data
  - c. Melakukan sosialisasi serta pelatihan khusus
  - d. Melakukan penyesuaian terhadap regulasi-regulasi baru
  - e. Melakukan perbaikan dan pemeliharaan jaringan
  - f. Memberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan
  - g. Melakukan evaluasi kinerja guna menghindari kesalahan pelaksanaan SIPD dalam proses perencanaan dan penganggaran
  - h. Melakukan penilaian keefektifan kinerja pegawai

#### IV. KESIMPULAN

Pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam perencanaan dan penganggaran di BAPPEDA kabupaten Gorontalo sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat beberapa hambatan dan permasalahan, hambatan tersebut yaitu: kurangnya koordinasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah kecamatan, terjadinya keterlambatan informasi serta data yang diperlukan oleh BAPPEDA untuk pelaksanaan SIPD pada proses perencanaan dan penganggaran, belum tersedianya Sumberdaya manusia yang berkualitas dan Sarana-prasana yang memadai pula, regulasi yang sering berubah-ubah, kurangnya fasilitas yang ada di BAPPEDA, admin SIPD sering datang terlambat karena jarak tempat tinggal yang jauh, adanya oknum yang mengoperasikan SIPD tidak sesuai dengan SOP dan ada (Agustino, 2006) (Dwijowijoto, 2004) adanya stakeholder yang melepas tanggung jawabnya

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian, penelitian juga hanya dilakukan pada satu OPD saja sebagai model studi kasus yang dipilih sesuai dengan teori yang digunakan.

#### **Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).**

Peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu peneliti menyarankan kepada rekan-rekan lainnya agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan SIPD dalam perencanaan dan penganggaran di BAPPEDA Kabupaten Gorontalo agar bisa menemukan hasil yang lebih mendalam dan dapat melihat perkembangan kedepannya.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada bapak Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan

penelitian ini serta kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang telah membimbing peneliti dalam proses penyusunan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Irwan, M. Rizal. 2021. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Bapelitbang Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Skripsi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Jatinangor
- Nasution, M. Irfan. 2021. Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAd) Kota Medan. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol. 9 No. 2
- Eka putra, Nanda Dias. 2021. Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. Jurnal Otonomi Vol. 21 No. 1
- Abdullah, M (2014) Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan. aswaja Pressindo. Yogyakarta.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Yogyakarta : Gramedia



Arsip Pribadi

**BUKTI PEMERIKSAAN SIMILARITAS  
PERPUSTAKAAN PUSAT IPDN JATINANGOR**

NOMOR: 000.5.2.4/BPS- 000256 //IPDN.21/2023

Nama : Rehan F.N. Lshak  
 NPP : 30.1323  
 Kelas : R2  
 Prodi/ Fakultas : Keuangan Pubek / fmp  
 Nomor Ponsel (WA) : 002127259540  
 Class Name dan No. Absen\* : 23

\*didapat dari akun Turnitin kelas

TANGGAL UPLOAD	PUKUL	EXCLUDE**	SIMILARITAS**
		<input type="checkbox"/> Data Bibliografi	<b>23<sup>0</sup>/<sub>0</sub></b>
		<input checked="" type="checkbox"/> Small Word (...)	
		<input type="checkbox"/> Quote Materials	

\*\*Diisi Petugas Perpustakaan IPDN

Praja

Rehan F.N. Lshak  
 NPP. 30.1323

Jatinangor, 27/3 2023  
 Petugas Perpustakaan IPDN

Jajang Nursugan, S.Sis  
 NIP. 196906272000031004

